

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan konflik pertanahan seakan tidak pernah usai di Indonesia, berdasarkan data yang dikeluarkan Mahkamah Agung pada tahun 2017 setidaknya terdapat 4820 perkara perdata sengketa tanah¹. Angka ini menunjukkan masih tingginya konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Pada tingkat provinsi berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria 2017 Jawa Timur menempati urutan pertama dengan tingkat konflik agraria terbanyak dengan 60 kasus dari 659 konflik agraria nasional². Dari sekian kasus konflik agraria yang terjadi di Jawa Timur terdapat 10 konflik agraria dengan kategori skala besar dan terindikasi atas adanya tindakan kesengajaan melawan hukum atas tanah (mafia tanah) di dalamnya³. Bahwa praktik mafia merupakan salah satu dari berbagai penyebab terhambatnya proses penyelesaian konflik atau bahkan juga memicu terjadinya konflik pertanahan.

Berdasarkan data Seksi Penanganan Masalah Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang masih terdapat 33 kasus pertanahan⁴. Di lihat dari system administrasi pertanahan di perparah juga dengan masih terdapat 847.456 bidang tanah belum terdaftar dari 1.144.991 bidang tanah seluruhnya di Kabupaten Malang. Artinya masih banyak peluang untuk terjadinya upaya-upaya penguasaan

¹Data jumlah kasus pertanahan di Indonesia pada website Mahkamah Agung RI <http://badilum.mahkamahagung.go.id/publik/statistik-perkara/statistik-perkara-perdata/2512-statistik-perkara-perdata-klasifikasi-objek-sengketa-tanah-tahun-2017.html> diakses pada 14 Maret 2018

² Grafis Konsorsium Pembaruan Agraria 2017

³ Berita Online pada www.jawapos.com/read/2017/09/08/155924/kapolda-jatim-satgas-harus-buru-mafia-tanah-kelas-kakap koran edisi 8 sep 2017 diakses pada 19 Maret 2018

⁴ Keterangan Kepala Seksi Penanganan Masalah Pertanahan BPN data sampai September 2018 masih terdapat 33 kasus perkara tanah 17 kasus diantaranya masih dalam proses penyelesaian dan 16 kasus lainnya belum terselesaikan.

tanah, dan penyerobotan yang tentu berdampak pada terjadinya konflik di bidang pertanahan.

Tanah adalah sumberdaya alam karunia dari tuhan yang maha esa kepada umat manusia di bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Menurut ajaran agama islam diyakini bahwa manusia sendiri berasal dari tanah dan kemudian kelak akan kembali ke tanah. Keniscayaan juga kebutuhan kepemilikan tanah sesungguhnya sudah sedemikian mendalam dalam benak rakyat Indonesia, bahwa tanah selayaknya untuk diperjuangkan. Bahwa pemikiran ini terbawa sejak masa-masa memperebutkan kedaulatan negara Indonesia dengan prinsip perjuangan membela tanah airnya. Sebuah ungkapan jawa mengatakan “*sedhumuk bathuk senyari bumi, yen perlu ditohi pati*”⁵. Salah satu ungkapan diatas menggambarkan bahwa kedudukan dan juga fungsi tanah yang begitu sangat penting keberlangsungan hidup manusia.

Di era modernisasi kepemilikan sebuah tanah banyak memiliki manfaat serta dapat menunjang beberapa aspek kehidupan manusia diantaranya dilihat dari aspek sosial kepemilikan tanah oleh seseorang menunjukkan tingkatan strata sosial seseorang tersebut. Pada masyarakat tradisional yang berprofesi sebagai petani tanah dijadikan sarana bersosialisasi, berorganisasi bahkan sebagai modal sosial. Namun perspektif ekonomi memandang tanah sebagai modal dasar bagi kehidupan manusia. Bahwa tanah dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan dengan menekankan pada produktifitas tanah tersebut dalam memperoleh provid dengan kata lain tanah tanah di dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk tujuan ekonomi.

⁵ Ismail, Nurhasan, “*Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat*”. Rechtsvinding. Vol. 1, No. 1 tahun Januari-April 2012

Dengan melihat begitu pentingnya keberadaan tanah bagi kehidupan manusia maka sebagai wujud kehadiran negara dalam konteks mensejahterakan adalah melalui regulasi perundang-undangan. Mengacu pada konstitusi yang mengatur mengenai tanah telah disebutkan pada pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar disebutkan bahwasanya bumi, air dan juga kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara serta diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat⁶. Memang dalam konstitusi tidak secara jelas disebutkan tanah, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud dari kata “Bumi” yaitu mengenai isi dari bumi itu sendiri dan seluruh kandungan di dalam bumi dan dapat dipahami bahwa tanah bagian dari bumi. Kemudian pada kata “dikuasai” bukan dalam artian “dimiliki” tetapi artinya memberikan wewenang pemerintah untuk mengatur atau memberikan regulasi terkait dengan hukum agraria

Berdasar pada kewenangan pemerintah dalam regulasi tentang pertanahan berbagai kebijakan pertanahan diluncurkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Sejak 1961 berbagai program telah dilakukan demi memberikan kepastian hukum hak atas pertanahan, diantaranya program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) pada tahun 1980, program PAP (Proyek Administrasi Pertanahan) atau biasa disebut dengan “Program Adjudikasi” pada tahun 1997, kemudian Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di tahun 2017. Bahwasanya dari sekian kebijakan diatas perihal konflik agraria masih menjadi masalah yang serius.

Dalam semangat reforma agraria versi presiden Joko widodo sebagai wujud keseriusannya dalam upaya mensejahterakan rakyat melalui menata ulang kembali

⁶ Undang Undang Dasar 1945

regulasi terkait pertanahan (*Landreform*) adalah dimasukkannya program reforma agraria pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018. Bahwa disebutkan ada beberapa poin penting yang menjadi salah satu program prioritas nasional terkait kebijakan reforma agraria salah satunya penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria, Pada dasarnya masih banyak hal yang dapat memicu terjadinya sengketa tanah yang berujung pada konflik agraria di Indonesia terlebih masalah administrasi⁷.

Salah satu konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Malang dan cukup menyita perhatian publik yakni konflik di Desa Dengkol Kecamatan Singosari, konflik terjadi antar masyarakat dengan TNI Angkatan Udara LANUD Abdurrahman Saleh terkait tanah garapan. Konflik yang terjadi atas tanah seluas 306 Ha melibatkan setidaknya 200 lebih warga Desa Dengkol dengan melalui proses penyelesaian yang cukup lama. Penyelesaian kasus konflik tanah di Desa Dengkol terhitung 18 tahun sejak awal terjadinya Konflik⁸.

Konflik terjadi di desa Dengkol pada dasarnya sejak tahun 1990 dan sampai saat ini ketegangan antara kedua belah pihak masih tinggi dan belum menemukan titik terang dalam penyelesaiannya. Hal ini juga diperparah bahwa lahan konflik tersebut merupakan tanah yasan yang belum pernah didaftarkan. Perihal administrasi tanda bukti hak atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut masih menjadi poin penting yang dipermasalahkan oleh warga desa Dengkol selaku

⁷ Berdasarkan pernyataan Effendi dari aspek administrasi pertanahan masih banyak masyarakat kurang begitu sadar terhadap pentingnya sertifikasi tanah. Faktor kedua dipicu oleh kelalaian dalam melakukan jual beli diantaranya pembelian tanah dengan status tanah tidak diselidiki, terlambat balik nama, tanah terlantar atau dikuasai orang lain, membeli tanah dalam masa sewa pihak lain, tanah warisan dikuasai orang lain, jual beli dengan hanya mengandalkan kuitansi dan sebagainya.

⁸ Berdasarkan keterangan salah seorang warga Dengkol yang terlibat konflik, Bapak Ari menyebutkan bahwa untuk penyelesaian kasus konflik ini sudah lama tapi sampai saat ini belum ada titik terang yang menguntungkan warga, kira-kira 18 tahunan warga berjuang merebut kembali hak-haknya

penguasa tanah sejak dulu. Warga masih meragukan putusan hak pakai tanah yang miliki oleh pihak lawan yaitu TNI AU Lanud Abdurrahman Saleh Malang yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan No 1 tahun 1990.

Berbagai metode penyelesaian yang dilakukan oleh kedua pihak mulai tahun 1999 hingga 2016 diantaranya melalui musyawarah, mediasi yang dimediasi oleh Kepala Desa saat itu, mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Malang serta pengambilan langkah penyelesaian melalui pengadilan pun juga sudah dilakukan oleh warga Dengkol namun dirasa belum membuahkan hasil atas gugatan masyarakat desa Dengkol yang menuntut dikembalikannya tanah tersebut ke warga terhadap pengambilalihan tanah tersebut oleh TNI AU Lanud Abdurrahman Saleh.

Perkembangan situasi konflik yang semakin lama mengalami kenaikan mulai tahun 1998-2000 konflik cenderung konstruktif dan pada tahun 2004-2008 berkembang menjadi destruktif dengan berbagai bentuk tindakan penolakan disertai dengan kontak fisik dengan meningkatnya intensitas konflik tersebut dan juga sifat konflik yang bersifat kambuhan pada tahun 2016 konflik kembali mencuat semenjak 6 tahun cenderung mulai mereda, hal ini tentu akan menyulitkan dalam proses penyelesaiannya. Berdasarkan prosedur penyelesaian tanah Badan Pertanahan Nasional terdapat dua cara penyelesaian konflik tanah yakni melalui legalitas administrasi hak tanah dan pengadilan. Seharusnya dua metode tersebut cukup mampu menyelesaikan masalah pertanahan.

Pada situasi konflik yang seperti ini tentu metode resolusi konflik yang perlu ditinjau kembali terkait efektifitasnya dalam menyelesaikan kasus atas tanah bekas yasan tersebut, bahwa masalah konflik yang ada di desa Dengkol mengapa proses

penyelesaiannya memakan waktu yang cukup lama hal ini disebabkan karena ketidakteraturan dalam sistem administrasi pertanahan ditunjukkan warga bersikukuh atas tanah yang ia kuasainya dengan tanpa landasan tand bukti hak, kedua adanya kesalahan dalam pengambilan tindakan penyelesaian, oleh para pihak yang berkonflik, selain itu juga dimungkinkannya ada oknum-oknum yang bertindak menyalahi hukum yang berdampak kepada konflik tanah atau dapat disebut sebagai mafia tanah. Hal ini mengakibatkan banyaknya kasus konflik sosial di bidang pertanahan yang sangat merugikan dan seolah merenggut hak dan keadilan masyarakat. Jika dilihat dari aspek hukum pidana melalui pendekatan struktural bahwa kondisi politik dan ekonomi menyebabkan budaya persaingan antar individu ketika pencapaian pribadi menjadi lebih penting dibandingkan kepentingan sosial⁹.

Melihat masih banyaknya potensi penyebab konflik tanah maka resolusi konflik sangatlah penting untuk menjadi landasan dalam menyelesaikan kasus konflik agraria yang terjadi serta memberikan beberapa opsi strategi konflik. Strategi penyelesaian masalah agraria harus berpangkal pada akar permasalahan dan beberapa kemungkinan penyebabnya. Penyelesaian konflik agraria berpangkal yang dimaksud diatas yaitu penyelesaian melalui identifikasi dini terhadap penyebab-penyebab terjadinya konflik, dengan segala kemungkinan atas dugaan tindakan menyalahi aturan dan berorientasikan penguasaan pada pertanahan yang berakibat konflik. Bahwa tindakan tersebut masuk dalam kategori mafia tanah. Maka agar penyelesaian konflik tidak hanya berfokus pada *soft approach* (negosiasi, mediasi, arbitrase) dan juga lebih efektif maka sangat perlu

⁹ Jay S. Albanese, *Kejahatan Terorganisasi akar dan perkembangannya*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, Hlm. 111

dilakukannya pemberantasan mafia atas kasus-kasus pertanahan di Indonesia melalui upaya penegakan hukum¹⁰. Dalam konteks penyelesaian konflik agraria manajemen strategis menjadi poin penting dalam hal menentukan mekanisme pemberantasan. Bahwasanya pemberantasan mafia dalam kerangka penyelesaian konflik pertanahan memerlukan strategi manajemen yang berbeda,¹¹ mengingat kasus kejahatan mafia bukan lagi menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional. Maka untuk memperkuat strategi sangatlah dibutuhkannya kerjasama antar lembaga pemerintah, mengingat bahwa keberhasilan manajemen strategis pada resolusi konflik terletak pada komunikasi (koordinasi)¹².

Berdasarkan beberapa masalah di atas maka sangatlah perlu dilakukannya penelitian mengenai bagaimana bentuk upaya resolusi konflik pertanahan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pertanahan dan juga Tim terpadu Satgas Anti Mafia Tanah dalam upaya menyelesaikan kasus konflik tanah yang melibatkan antara kelompok warga desa Dengkol dengan TNI AU Lanud Abdurrahman Saleh Malang dan apa saja kendala dalam pelaksanaan resolusi konflik atas tanah yasan yang terjadi di desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang diatas, sangatlah penting bagi peneliti untuk mempelajari lebih lanjut dan mendalam terkait dengan resolusi konflik pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional, pemerintah Desa Dengkol dan

¹⁰ Maris, Masri, *How To Manage Conflict kiat menangani konflik*, Jakarta, Erlangga, 2001 Hlm. 33-34

¹¹ Hendrick. William, *Bagaimana Mengelola Konflik Petunjuk Praktis untuk Manajemen Konflik yang Efektif*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004 Hlm. 8

¹² David. Fred R, *Manajemen Strategis Konsep*, Jakarta, Salemba Empat, 2009 Hlm. 23

Polres Malang dalam menyelesaikan kasus konflik pertanahan yang hingga saat ini masih terjadi ketegangan diantara kedua belah pihak. Sehingga hasil dari dilakukannya penelitian akan menjawab pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Resolusi Konflik Tanah Yasan Di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ?
2. Apa Permasalahan Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Yasan Di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka dari itu tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses resolusi konflik tanah yasan di Desa Dengkol Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui apa permasalahan dalam penyelesaian konflik tanah yasan di Desa Dengkol Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat secara teoritis maupun praktis serta akademis, yakni sebagai berikut :

1. Manfaat teori dan Akademis
 - a) Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan yang lebih terkait bagaimana upaya manajemen penyelesaian konflik pertanahan terhadap kasus konflik yang terjadi di Desa Dengkol kecamatan Singosari kabupaten Malang serta sedikit menganalisa penyebab-penyebab tersendatnya

penyelesaian konflik dalam proses resolusi konflik di bidang pertanahan yang berdasarkan keadilan.

- b) Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menelitian selanjutnya dalam konteks penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Malang.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah harapannya penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dalam pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah strategis serta sebagai bentuk evaluasi dalam upaya penyelesaian konflik tanah yang terjadi di kabupaten Malang.
- b) Bagi Institusi, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi atau bahan bacaan bagi penyelenggara pendidikan terutama mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang mengenai upaya penyelesaian konflik oleh Badan Pertanahan Nasional dan bekerjasama dengan Institusi Kepolisian sebagai salah satu wujud dari kebijakan reforma agraria. Disamping itu hasil penelitian juga dapat menambah koleksi *research* perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang.
- c) Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangsih pemikiran agar masyarakat lebih memahami pentingnya sertifikat Hak atas tanah serta masyarakat untuk lebih berwasapada terhadap upaya yang mengarah pada tindak kriminal penyerobotan tanah oleh oknum tertentu yang berujung konflik pertanahan. Sehingga masyarakat dapat segera melaporkan apabila terjadi kejanggalan dibidang pertanahan dan segera melaporkannya.

E. Definisi Konsep

1. Konflik

Maswadi Rauf dalam mendefinisikan konflik diartikan sebagai:

“Setiap Pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok masyarakat”

sedangkan Pruitt dan Rubin mengartikan konflik hampir sama yaitu pertentangan antar dua belah pihak yang bersebrangan¹³.

Menurut Robbins (1996) dalam “Organization Behavior” mengemukakan konflik adalah :

“suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat yang berpengaruh atas pihak-pihak terlibat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif”

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan bahwa yang dimaksud konflik agraria atau (pertanahan) adalah perselisihan pertanahan antara perseorangan, kelompok atau golongan, organisasi badan hukum serta lembaga yang mempunyai kecenderungan sudah berdampak luas di lingkungan masyarakat.

2. Resolusi Konflik

Konflik sosial adalah fenomena sosial yang sangat membutuhkan penyelesaian konflik (*conflict resolution*). Selain itu konflik sosial merupakan fenomena yang mempengaruhi pembuatan keputusan. Bahwasanya semakin rumitnya konflik tentu akan membuat sulit dalam memberikan keputusan yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak.

Wirawan mendefinisikan resolusi konflik (*conflict resolution*) adalah

“sebuah proses dalam mencapai keluaran konflik melalui metode resolusi konflik”¹⁴

¹³ Materi Bahan Ajar Manajemen Konflik dan Konsensus Oleh Bpk. Salahudin S.IP., M.Si., M.PA

¹⁴ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*, Jakarta, Salemba Humanika, 2010, hlm 177

metode ini dipahami sebagai sebuah proses manajemen konflik yang digunakan agar menghasilkan keluaran konflik yang dikehendaki.

3. Manajemen Konflik

Menurut Wirawan Manajemen konflik sebagai suatu proses di mana pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun sebuah strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan keluaran (resolusi) yang diinginkan”.¹⁵ Sedangkan manajemen konflik menurut Lenne Irvine (1998) di definisikan sebagai:

“the strategy which organization and individual employ to identify and manage differences, thereby reducing the human and financial cost of unmanaged conflict, while harnessing conflict as a source of innovation and improvement.”

Manajemen konflik merupakan langkah-langkah strategis organisasi dalam memahami suatu permasalahan dan menentukan strategi penyelesaian atas masalah tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan suatu organisasi. Bahwasanya jika suatu konflik tidak di manajemen dengan baik maka akan berkembang sifatnya dari konstruktif menjadi konflik destruktif.

4. Tanah Yasan

Tanah yasan dipahami sebagai tanah milik adat yang didasarkan pada hukum suatu kelompok masyarakat adat. Adapun hak yang dipakai dalam menguasai atas tanah tanah adat dinamakan sebagai hak yasan. Menurut Kades Dengkol menyebutkan:

“tanah yasan itu tanah milih adat desa Dengkol yang kemudian diberikan kepada masyarakat adat pada jaman dulu, atas dasar hak milik perorangan¹⁶.”

¹⁵ Ibid hlm 129

¹⁶ Wawancara dengan Kades Dengkol Bpk Supriyadi pada 20 September 2018

Sejak dibentuknya Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tanah yasan tersebut dikonversikan atau dirubah istilahnya menjadi tanah hak milik. Pengajuan Hak milik di sini juga di dasarkan pada dokumen-dokumen penguasaan tanah adat pada masyarakat adat atau Desa setempat melalui dokumen Letter C Desa dan juga Surat Petok D.

F. Definisi Operasional

1. Resolusi Konflik Tanah di Desa Dengkol Kabupaten Malang

- a. Identifikasi Konflik tanah di desa Dengkol, identifikasi merupakan salah satu bentuk upaya memahami situasi konflik dengan didasarkan pada kronologi konflik dan juga analisa terhadap penyebab-penyebab terjadinya konflik. Identifikasi dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik yaitu kelompok warga dengkol dan anggota TNI AU Lanud Abdurrahman Saleh serta pemerintah sebagai upaya mengenali situasi konflik, pihak yang terlibat, penyebab konflik serta menganalisa terhadap sumberdaya ataupun keterbatasan. Di sisi lain identifikasi konflik juga merupakan wewenang instansi pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pertanahan Kabupaten Malang dan Polres Malang selaku lembaga yang juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus pertanahan.
- b. Resolusi Konflik tanah yasan di Desa Dengkol, resolusi konflik ini merupakan inti dari proses penyelesaian sebuah masalah yang terdiri atas bagaimana mekanisme pelaksanaan penyelesaian konflik agraria oleh lembaga-lembaga pemerintah pemerintah dalam hal ini Pemerintah Desa Dengkol, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pertanahan Kabupaten Malang, Polres Malang dalam memutuskan langkah penyelesaian sesuai dengan prosedur penyelesaian.

Mekanisme penyelesaian dilakukan dengan cara proses administrasi, Mediasi, melalui jalur Pengadilan dan serta dengan metode baru yakni Pemberantasan Mafia Tanah. metode ini adalah upaya pencegahan adanya kepentingan pihak lain dalam konflik pertanahan. Selain itu merupakan upaya preventitif yang dilakukan untuk mengantisipasi pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi konflik untuk mengambil keuntungan pribadi yang berakibatkan semakin luasnya konflik dan juga terhambatnya proses penyelesaian konflik pertanahan.

- c. Interaksi Konflik, dapat diartikan juga sebagai proses manajemen. Manajemen ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari identifikasi konflik, strategi merupakan proses dalam menentukan langkah-langkah apa yang memungkinkan dapat diambil oleh masing-masing pihak dalam melakukan penyelesaian sebuah konflik. Strategi didasarkan pada keluaran konflik yang dikehendaki. Ketika kedua pihak telah menentukan strategi masing-masing tentu akan menghasilkan sebuah pola interaksi sosial diantara keduanya pihak yang terlibat konflik. Pola interaksi ini kemudian akan membentuk sebuah suasana konflik, apakah konflik bersifat konstruktif atau malah cenderung destruktif.
2. Permasalahan dalam proses penyelesaian konflik tanah yasan di Desa Dengkol Kabupaten Malang
 - a. Keterbatasan Sumberdaya Manusia kelompok Warga, bahwasanya pemahaman warga pada system administrasi pertanahan masih tergolong kurang. Permasalahan sumberdaya manusia memang menjadi salah satu kendala dalam proses penyelesaian konflik tanah tersebut. yang terjadi di Dengkol adalah disebabkan keterbatasam SDM terhadap system administrasi dan sertifikasi tanah oleh salah satu pihak yang berkonflik yakni warga desa Dengkol. Warga

bersikukuh atas tanah yang dia kuasai dengan hanya berlandaskan alas hak Petok D dan SPPT saja. Sedangkan kedua dokumen tersebut bukan merupakan alat bukti hak tanah melainkan hanya sebagai penentuan lokasi persil bidang tanah untuk kebutuhan pembayaran pajak.

- b. Adanya Bentuk Tindakan Mafia Tanah, melihat proses penyelesaian konflik tanah di desa Dengkol yang berlarut-larut dan konflik cenderung kembali mencuat, hal ini mengindikasikan bahwa ada sesuatu permasalahan lainnya. Mengingat masih banyaknya peluang terjadinya konflik tanah dari aspek administrasi maka tidak menutup kemungkinan jika ada oknum tertentu yang memanfaatkan situasi konflik untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan terhambatnya proses penyelesaian masalah konflik tanah di Desa Dengkol.

G. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam memperelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif, di mana metode kualitatif lebih berdasar pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dengan berusaha menafsirkan makna suatu peristiwa tingkah laku manusia menurut perspektif peneliti¹⁷. Adapun tahapan metode yang digunakan dalam mendukung penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, bahwa penelitian deskriptif (*descriptive*) ialah bersifat menggambarkan atau melukiskan suatu hal. Terdapat tiga hal yang perlu digambarkan pada proses penelitian kualitatif yakni

¹⁷ Usman, Husain. dan Setyadi A, Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara, 2011, Hlm.78

karakteristik perilaku, kegiatan atau kejadian yang terjadi selama proses penelitian serta keadaan lingkungan atau karakteristik tempat penelitian berlangsung¹⁸.

2. Subyek penelitian

Subjek penelitian menurut Amirin (1986) merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh data dan juga keterangan dari hasil wawancara, sedangkan Suharsimi Arikunto (1989) membatasi subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan¹⁹. Dalam menentukan subjek penelitian peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya²⁰. Adapun subjek dalam penelitian ini diantaranya:

- a) Dua anggota Unit IV Satreskrim Polres Malang. Kanit IV Reskrim Bpk. IPTU Sutiyo, SH. M.Hum dan BRIG Choirul SH
- b) Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan BPN Kabupaten Malang Ibu Heny.
- c) Dua Perangkat Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Kades Dengkol Bpk. Supriyadi dan Sekdes Bpk. Harto Sutikno
- d) Sepuluh warga desa Dengkol yang terlibat konflik tanah. Diantaranya Ibu Nurjanah, Pak Maksum, bpk Agus, bpk Edi, bpk Ari, bpk Abdul Mujib, bpk Sobar, bpk Suradi, bpk Lestari, bpk Mat Kosim, bpk Nurawi, bpk Sukiyat dan bpk Syekh.

¹⁸ Ibid Hlm.129-130

¹⁹ Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta, Gelora Aksara Pratama, 2009, Hlm.91

²⁰ Ibid, Hlm 96

- e) Dua anggota Bidang Penanganan Masalah Pertanahan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang. Ibu Asri dan Bpk Hendra.

3. Sumber data

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli yang secara langsung didapatkan dari Informan yang memiliki informasi atau data tersebut²¹. Data primer sangatlah dibutuhkan untuk memperkuat data informasi penulis dalam melakukan penelitian. Adapun bentuk data primer yang dibutuhkan yaitu hasil wawancara, dokumentasi, ataupun laporan kegiatan terkait manajemen penyelesaian konflik pertanahan di Desa Dengkol Kabupaten Malang.

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data yang menunjang dilakukannya penelitian. Bahwa beberapa sumber data primer meliputi penelitian pustaka, artikel, jurnal, website ataupun perundang-undangan.

4. Teknik pengumpulan data

a) Observasi

Menurut Poerwandi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan memperhatikan hubungan antar aspek dalam suatu fenomena tertentu²². Sedangkan menurut Suparlan pengamatan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai gejala-gejala yang dalam kehidupan sehari-hari

²¹ Ibid Hlm 86

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktik*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, Hlm. 143

dapat diamati, kemudian hasil pengamatan dianalisa secara mendalam untuk mengetahui makna dibalik gejala-gejala tersebut²³.

Pada kasus konflik pertanahan ini peneliti melakukan observasi terhadap kronologi terjadinya konflik dan juga bagaimana pola interaksi dalam proses penyelesaian konflik pertanahan di Desa Dengkol Kabupaten Malang

b) Wawancara

Menurut Banister dkk. wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang mengarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Wawancara kualitatif peneliti dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami oleh individu mengenai topik yang diteliti, serta bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah jenis wawancara mendalam, yaitu bentuk wawancara melalui teknik bahwasanya peneliti dan informan bertatap muka secara langsung di dalam wawancara yang dilakukan. Patton (2001) menegaskan bahwa wawancara di tujukan untuk mendapatkan apa yang terdapat dalam pikiran orang lain²⁴. Adapun pihak yang akan menjadi objek wawancara adalah anggota Polres Malang melalui satuan reskrim, pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, perangkat Desa Dengkol serta warga desa Dengkol Singosari Kabupaten Malang.

c) Dokumentasi

Dokumentasi menurut Gottschalk yaitu setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis. Menurut Bungin teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data

²³ Ibid, Hlm.149

²⁴ Ibid, Hlm. 161-165

historis. Pada umumnya bentuk dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambar atau foto, dokumentasi resmi, hasil wawancara, laporan kegiatan, dan sebagainya yang berasal dari instansi selaku subjek penelitian.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian penulis akan tujukan ke instansi terkait. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu Dusun Krajan Desa Dengkol Kacamatan Singosari Kabupaten Malang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang yang beralamatkan di Jl. Terusan Kawi Nomor 10 kecamatan Klojen Kota Malang dan Kepolisian Resort (Polres) Malang dengan alamat di Jl Ahmad Yani Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif mengenai strategi penyelesaian konflik terhadap konflik pertanahan yang terjadi di Desa Dengkol kabupaten Malang. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain²⁵. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Hubberman. Menurut Miles dan Hubberman terdapat tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif yaitu 1) reduksi data, 2) Penyajian data, 3) penarikan/ verifikasi kesimpulan.

²⁵ Bogdan dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, CV. Alfabeta, 2013, Hlm. 244

a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses dimana data itu diperoleh, adapun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data diperoleh melalui penentuan sejak awal. Pengambilan data kualitatif dilakukan dengan cara pengamatan observasi (*partisipant Observation*) kemudian dilanjutkan melalui proses wawancara langsung secara mendalam, dokumentasi dan juga didukung dengan data penunjang (sekunder) melalui studi kepustakaan, data website dan sebagainya.

b) Reduksi Data

Reduksi data dimaknai sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan pengabstrakan, dan perubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan²⁶. Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh bukanlah data yang bersifat final dan dapat langsung dinalisa, melainkan data yang didapatkan pada saat dilakukannya penelitian perlu dilakukannya reduksi berdasarkan poin-poin kualitas dan kuantitas data itu sendiri untuk mendukung informasi dalam penelitian.

c) Display Data

Display data dimaknai sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendiskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan oleh Miles dan Hubberman (1992)²⁷. Melalui display data peneliti dimudahkan dalam memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan²⁸.

²⁶ Miles Dan Hubberman dalam Prof. Emzir, *Motodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010, Hlm. 129

²⁷ Ibid, Hlm. 131

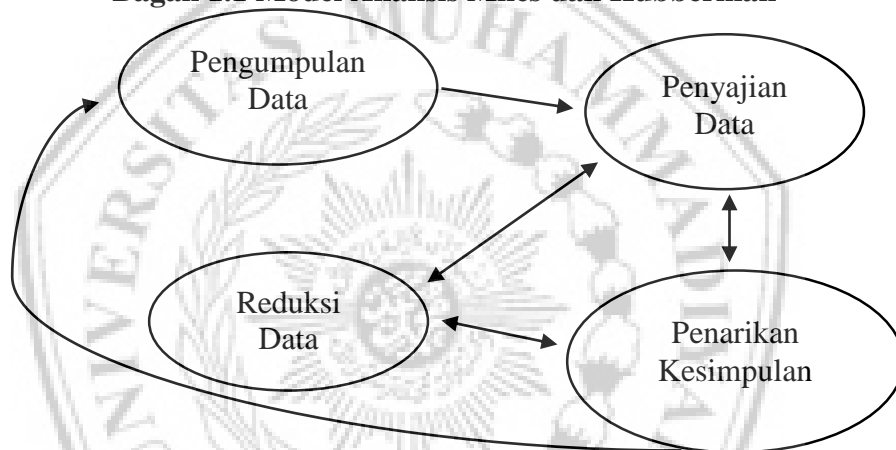
²⁸ Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta, Gelora Aksara Pratama, 2009, Hlm.151

d) Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan data adalah tahapan terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif dengan model yang kemukakan oleh Miles dan Hubberman. Bahwa kesimpulan data yakni proses verifikasi dari data yang telah dipilih oleh peneliti pada tahap pengumpulan data yang kemudian disimpulkan untuk menjawab pertanyaan peneliti²⁹. Artinya kesimpulan data merupakan fakta yang bersifat final dan tentu menggambarkan hasil akhir dilakukannya penelitian.

7. Model Analisis Data

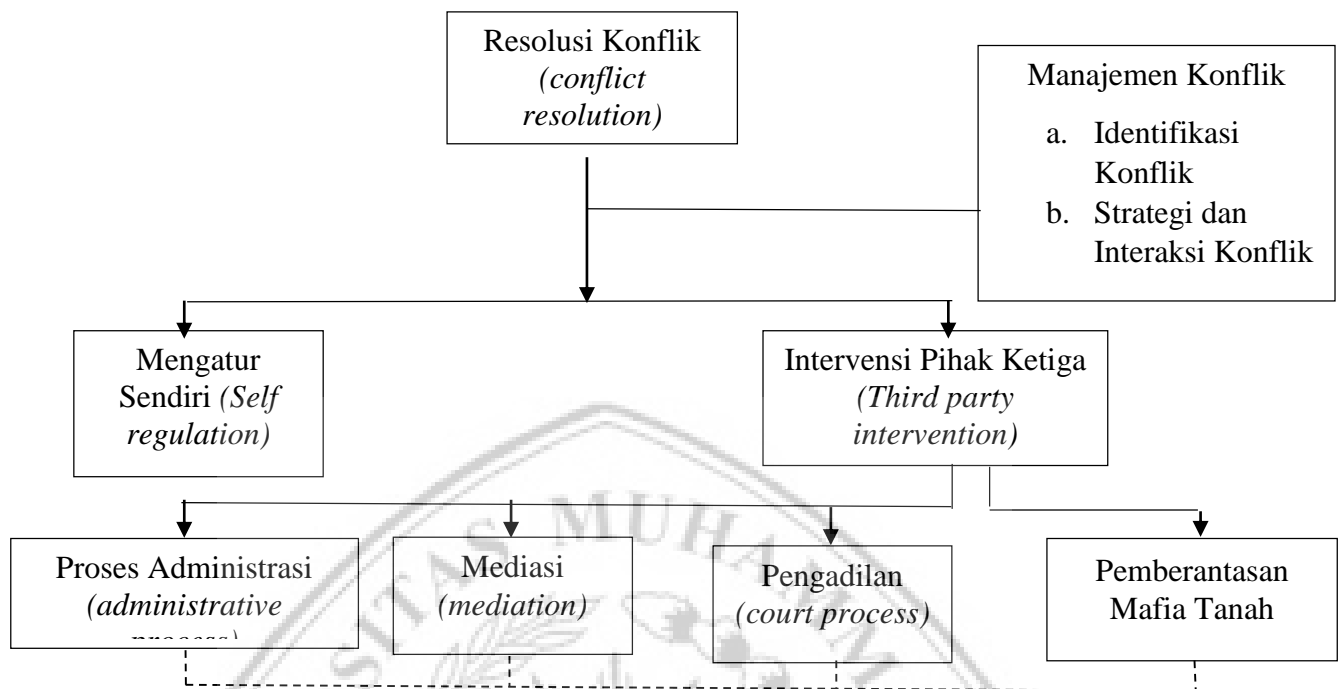
Bagan 1.1 Model Analisis Miles dan Hubberman



Sumber : Sugiyono. 2012 Hlm. 247

²⁹ Sugiyono, P. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. 2013 Hlm 225

8. Kerangka Berfikir



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir Resolusi Konflik

Sumber : *Konflik dan Manajemen Konflik*, Wirawan hlm 177

Pada penelitian ini peneliti menggunakan kerangka berfikir yang dikemukakan oleh Wirawan tentang metode resolusi konflik dengan sedikit dikomparasikan dengan resolusi konflik pertanahan. Dalam proses resolusi konflik Wirawan menyebutkan bahwa terdapat berbagai pilihan penyelesaian untuk mencapai keluaran konflik yang diinginkan. Dia membaginya menjadi dua, yaitu melalui pengaturan sendiri (*self regulation*) dan intervensi pihak ketiga (*third party intervention*) Sebelum menentukan langkah penyelesaian dalam sebuah konflik tentu harus didasari dengan berbagai pertimbangan tertentu, pertimbangan tersebut dapat disebut sebagai proses manajemen konflik. Pada tahapan ini wirawan memberikan dua indikator utama sebagai bahan pertimbangan yaitu strategi dan interaksi konflik. Strategi dipergunakan sebagai landasan *planning* dalam

penyelesaian kasus konflik dengan memperhatikan situasi, kondisi atau respon pihak lawan.

Penyelesaian melalui Pengaturan sendiri (*self regulation*) yang menekankan pada penyelesaian yang didasarkan pada inisiatif kedua pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahannya dengan melalui cara musyawarah atau dengan membentuk kesepakatan-kesepakatan tertentu. Penyelesaian melalui cara ini bisa bersifat *win & win solution* atau bahkan dengan prinsip *win & lose solution*. Inti dari metode ini adalah mengakomodasi tuntutan dari kedua pihak dalam menentukan solusi.

Adapun cara penyelesaian kedua yaitu melalui intervensi pihak ketiga, metode ini menekankan pada pihak ketiga yang mempunyai kewenangan penyelesaian konflik dan memberikan putusan yang memiliki kekuatan hukum. Metode ini dapat dilakukan dengan tiga cara yakni pengadilan dikhususkan untuk konflik yang cenderung besar, proses administrasi, dan melalui resolusi alternative. Pada konteks penyelesaian konflik tanah resolusi alternative ini dapat dilakukan dengan cara mediasi dan juga melalaui metode pemberantasan mafia tanah selaku bagian dari salah satu penyebab terjadinya konflik tanah. konsep ini diharapkan akan membantu dalam proses penyelesaian kasus pertanahan.